



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

UNIT KERJA : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOH. DJAMIL
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 485023

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 852.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/99 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/36 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
3. Tanah Seluas 284 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 244 m2/140 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
6. Tanah Seluas 571 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
7. Tanah Seluas 1.729 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 22.000.000

1. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.100.000



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 876.100.000

III. HUTANG

Rp. 170.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 706.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.